

# DEMOKRASI DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN BARAT DAN ISLAM (KAJIAN TENTANG NILAI-NILAI DEMOKRASI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN INDONESIA)

Mufiqur Rahman

STAI Al-Khairat Pamekasan

Email: maufiqurrahmansurahman@gmail.com

**Abstract:** Is there democracy in Islam?, how is the attitude of Muslims to democracy, is Islam compatible with democracy? This question gets a different reaction from Muslim thinkers. This means that Democracy in Islam is still a controversial issue, both theoretically and practically. There are at least two groups or blocks of views from Muslim thinkers. First the conservative group, they reject openly Islamic relations with democracy. For them in Islam there is no place for democracy. Second, the moderate Islamic view group. This group holds that the substance (essence) of democracy is in line with Islamic principles. While democracy in the view of Western educational philosophy in this paper is represented by the opinion of Dewey (1916/1996), Schumpeter (1942), Dahl (1971) and Zulu records (2001). While the view of democracy in the philosophy of Islamic education is represented by the view of moderate Islamic groups that bring Democracy into Islamic education in a dialogical way. The point is that the values of Democracy can be strengthened through education. Democracy and education are entities that can not be separated in achieving the two educational objectives as Nurcholis Madjid said in Indonesia context.

**Keywords:** democracy, western and Islamic education philosophy.

## Pendahuluan

Kata *Demokrasi* berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Di dalam kamus *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*<sup>1</sup>

“(1) country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives;(2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each by citizens as equals.”

---

<sup>1</sup> A.S. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary* (London: Oxford University Press, 2003), 261

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara dan atau masyarakat, yaitu warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu.. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat bagi setiap warga negara, menegakkan *rule of law*, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.<sup>2</sup>

Seperti halnya dengan Teori Demokrasi Dewey (1916/1996) mengatakan bahwa demokrasi adalah model kehidupan sosial dan tidak hanya berbicara soal politik *an sich*. Demokrasi dalam implementasinya membutuhkan peran dan kerja sama semua pihak, seperti institusi sosial, lembaga politik, ekonomi, lembaga pendidikan, saintis, lembaga agama artistik dan semu warga dalam sebuah negara. Inilah demokrasi dalam sudut yang komprehensif dan bersifat integratif konektif antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup> Maka makna demokrasi adalah sangat luas dan tidak hanya menyoal soal pesta politik saja, Dewey meyakinkan bahwa untuk mewujudkan demokrasi perlu peran serta masyarakat, termasuk juga lembaga pendidikan.

Dalam bukunya berjudul "*freedom and culture*" Dewey memperkenalkan bahwa demokrasi membutuhkan *free speech, free press, free assembly, and an education system that encourages inquiry - a scientific attitude*. Yaitu kebebasan berbicara, berkumpul/komunitas, system pendidikan yang mendorong terhadap kepribadian ilmiah.<sup>4</sup>

Beberapa tokoh barat mendefinisikan demokrasi Pada tingkat yang paling dasar, diantaranya (Schumpeter 1942) menyebutkan bahwa sistem demokrasi dapat didefinisikan dalam istilah prosedural sebagai 'pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuatan untuk memutuskan melalui perjuangan kompetitif untuk pemungutan suara rakyat. Memperluas definisi ini, Dahl (1971) mengidentifikasi tujuh kriteria utama yang penting untuk demokrasi, atau apa yang lebih suka disebut sebagai '*polyarchy*'. Ini termasuk:<sup>5</sup>

1. Kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan yang secara konstitusional dipegang oleh pejabat terpilih
2. Pemilu yang relatif sering, adil dan bebas
3. Hak pilih orang dewasa universal

---

<sup>2</sup> Mochammad Parmudi, *Islam dan Demokrasi Di Indonesia; Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam* (Laporan Hasil Penelitian individual, Dipa 2014), 11.

<sup>3</sup> Barbara J. Taylor Bacon, *Education's role in democracy; the power of pluralism*, Etica & Politica / Ethics & Politics, XII, 2010, 1, 135.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 140

<sup>5</sup> Alina Rocka Minokal, *Analysing The Relationship Between Democracy And Development: Defining Basic Concepts And Assessing Key Linkages*, Background note (1) prepared for the Wilton Park Conference on Democracy and Development, 23-25 October 2007

4. Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik
5. Kebebasan berekspresi
6. Akses ke sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lainnya
7. Kebebasan berserikat (yaitu hak untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan lain-lain).

Secara mendasar, definisi Demokrasi formal Dahl mencakup kebebasan sipil yang seharusnya, pada prinsipnya, menjamin bahwa proses demokrasi bersifat inklusif, bebas dari penindasan dan memungkinkan warga negara berpartisipasi secara terinformasi dan otonom. Namun, fokus dari definisi ini, masih dalam kontestasi, atau proses pemilihan itu sendiri. Untuk waktu yang lama, masyarakat internasional juga cenderung menempatkan keyakinan yang luar biasa akan pentingnya pemilihan yang menentukan dan apa yang dapat mereka capai untuk proses demokratisasi - ada asumsi implisit bahwa pemilihan tidak hanya sekedar batu pondasi tapi juga generator kunci dari waktu ke waktu reformasi demokratis lebih lanjut.

Dalam perpektif sejarah Bryan S. Roper, menulis buku berjudul Sejarah Demokrasi: Interpretasi Marxis. Dengan Geoff Kennedy, Universitas Durham Dalam buku barunya, Bryan Roper menyajikan sebuah catatan Marxis mengenai sejarah demokrasi untuk Mengidentifikasi, membayangkan dan mengklarifikasi alternatif demokratis potensial ke dunia yang didominasi oleh kapitalisme liberal dan Amerika Serikat .Analisis historis materialis tentang demokrasi, Roper menunjukkan kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang telah mendorong kemunculan dan perkembangan bentuk-bentuk utama demokrasi di masa lalu, dan membuat kita lebih siap untuk berpartisipasi dalam perjuangan menuju dunia yang lebih demokratis di masa depan. Oleh karena itu, untuk memahami sejarah demokrasi agar lebih efektif berjuang untuk alternatif bentuk demokrasi representatif kapitalis yang mendominasi masa kini. Alternatif ini ditemukan dalam tradisi demokrasi partisipatif sosialis, yang Menggabungkan unsur-unsur demokrasi Athena dan perwakilan, sementara mentransendensikan mereka supaya memfasilitasi partisipasi langsung mayoritas warga di pemerintahan dari masyarakat.<sup>6</sup>

Roper menjelaskan ide Marxisme yang signifikan terhadap sejarah pembentukan negara dan kelas di Barat termasuk Athena, Roma, Eropa pada Abad Pertengahan; revolusi borjuis di Inggris, Amerika dan Prancis; Eropa antara revolusi tahun 1848 dan Komune Paris tahun 1871, dan perkembangan bentuk-bentuk demokrasi sosialis partisipatif yang terinspirasi Marx pada abad ke-20. Sejarah yang agak rumit disajikan kepada para pembaca dalam prosa yang sangat jelas, dan banyak perhatian difokuskan pada perjuangan yang memainkan peran penting dalam sejarah demokratisasi.

---

<sup>6</sup> Bryan S. Roper, *The History of Democracy: A Marxist Interpretation* (Pluto Press, 2012), ...

Dalam Islam demokrasi disebut dengan istilah *syura*, berasal dari kata kerja *syawara* - *yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. 12 Ada bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja *syawara* adalah *asyara* (memberi isyarat), *tasyawara* (berunding, saling bertukar pendapat), *syawir* (meminta pendapat, musyawarah) dan *mustasyir* (meminta pendapat orang lain). *Syura* atau *musyawarah* adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara<sup>7</sup>

Di dalam Alquran, mengenai pengertian ini terdapat pada tiga tempat, yaitu:

1. Surat al-Baqarah ayat 233:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

2. Surat al-Syura ayat 38:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka”. (QS. al-Syura: 38).

3. Surat Ali Imran ayat 159:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran: 159).

Dari ketiga ayat yang telah disebutkan di atas, Allah swt. mengajarkan manusia untuk senantiasa mengedepankan musyawarah dalam segala urusan, dan

---

<sup>7</sup> Muhammad Ichsan, *Demokrasi dan Syura perspektif Islam dan Barat*, Substantia, Volume 16 Nomor 1, April 2014, 6.

bahkan Allah swt. memberi pujian kepada orang-orang yang menerima seruan Allah dan memberi nikmat bagi orang-orang yang melaksanakannya karena hal itu bernilai ibadah. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya.

Abdul Ghani Ruhhal dalam bukunya *Al-Islamiyūn wa sarab al-Dimuqrathī (Aktifis Islam Dan Fatamorgana Demokrasi)* mendefinisikan kekuasaan rakyat oleh rakyat, artinya adalah rakyat sumber kekuasaan. Ia menyebutkan bahwa orang pertama yang mencetuskan demokrasi adalah Plato. Lalu ia menjelaskan bahwa sumber kepemimpinan adalah kehendak publik. Definisi seperti ini juga diungkapkan Muhammad Qutun dalam bukunya “*Madzāhib Fikriyah Mu’asirah* (Konsep Pemikiran Kontemporer), juga oleh penulis buku *al-Demoqratiyah fī al-Islam*.<sup>8</sup>

Abu Nasyr, tokoh fundamentalis ortodoks, dalam bukunya *Islam Mengharamkan Demokrasi*, mengatakan bahwa demokrasi tidak dapat dipadukan dengan Islam, artinya Islam bertolak belakang dengan demokrasi. Dengan berbagai alasan yang menurut penulis sangat tekstual, berikut ini adalah tiga dari sepuluh alasan Nasyr menolak demokrasi;<sup>9</sup>

1. Yang berhak membuat hukum dalam Islam hanya Allah semata yang tiada sekutu baginya karena Allah telah berfirman.<sup>10</sup>
2. Islam tidak dapat dipadukan dengan demokrasi termasuk dalam hal *furu’iyyah*, sebab Islam adalah agama Universal dan meliputi semua aspek kehidupan.<sup>11</sup>
3. Jika kita memadukan Islam dan demokrasi, kita tidak akan selamat dari siksa Allah.<sup>12</sup>

Sekitar pertengahan abad ke 19, negara-negara di dunia muslim mendapat kontak atau bersentuhan dengan industri, komunikasi, gagasan politik yang berasal dari barat, terutama Eropa. Kontak dunia muslim dengan barat melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang dilontarkan oleh sebagian pejabat muslim yang mempelajari dunia barat, khususnya tentang lembaga dan sistem politik seperti demokrasi.

Pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan pemikir muslim adalah, adakah demokrasi dalam Islam?, bagaimana sikap muslim terhadap demokrasi, apakah Islam kompatibel dengan demokrasi? Pertanyaan ini mendapat reaksi yang berbeda dari kalangan pemikir dunia muslim. Ini artinya Demokrasi dalam Islam masih menjadi persoalan yang kontroversial, baik secara teori maupun praktis. Setidaknya Ada dua kelompok atau blok pandangan dari para pemikir Muslim. *Pertama*, kelompok konservatif, mereka menolak secara terang-terangan hubungan Islam dengan demokrasi. Bagi mereka di dalam Islam tidak ada tempat untuk demokrasi. Kelompok ini diwakili oleh Syaikh Fadhallah Nuri, dan Muhammad

---

<sup>8</sup> al-Imam Muhammad Abu Nashr, *Islam Mengharamkan Demokrasi* (Yogyakarta: Bustan, tt), 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>10</sup> Lihat surat al-Kahfi ayat 26

<sup>11</sup> Lihat surat an-Nisa’ ayat 65.

<sup>12</sup> Lihat surat al-Jatsiyah ayat 18-19

Husein Thabathabaie dari Iran, Sayyid Qutub, dan Al-Sya'rawi dari Mesir, Ali Benhadj dan Abdel Kader. Bahkan Qutub mengatakan bahwa Negara-negara Arab seperti Mesir sudah keluar dari nilai-nilai Islam, dan Mesir dianggap sebagai negara jahiliyah modern. Kedua, kelompok pandangan Islam liberal. Kelompok ini didukung oleh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Syaikh Muhammad Syaltut, Toha Husein, Yusuf Qardhawy, Fazlur Rahman, dan pemikir dari Indonesia seperti Munawir Sjadzali, Abdurrahman Wahid, M. Syafi'i Maarif, Kuntowijoyo, M. Dawam Raharjo, Azzumardi Azra, dll. Menurut Yusuf Qardawi, substansi (hakikat) demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>13</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, secara substansi antara demokrasi dan syura terdapat perbedaan. Tetapi ia juga menyebutkan adanya persamaan di antara keduanya. Persamaannya, persoalan-persoalan masyarakat itu dikembalikan kepada kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat itu dapat diketahui dengan bertanya kepada orang demi orang, bisa melalui perwakilan. Sedangkan perbedaannya, kalau demokrasi itu ada yang dikatakan kembali kepada rakyat, sementara dalam syura ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ditetapkan Allah swt.<sup>14</sup>

Dalam Islam, ada hal yang tidak boleh dimusyawarahkan. Misalnya, persoalan ibadah harus diterima sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam agama. Itu bukan wilayah musyawarah. Kita tidak bisa bermusyawarah berkaitan dengan jumlah rakaat shalat. Kita harus menerima ketentuan tersebut apa adanya. Sementara itu, Ahmad Sudirman<sup>17</sup> mengemukakan perbedaan yang paling mendasar antara konsep syura menurut Islam dan demokrasi menurut Barat, yaitu musyawarah menurut Islam merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan *ulil amri* dan segala urusan harus dikembalikan kepada dasar dan sumber hukum yang diturunkan Allah set. dan dicontohkan Rasulullah saw. Adapun demokrasi adalah sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah baik melalui cara langsung seperti referendum maupun dengan cara tidak langsung melalui perantaraan wakilnya. Jadi, konsep syura menurut Islam adalah sistem pemerintahan dimana Allah swt. yang berdaulat, sedangkan konsep demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat yang berdaulat. Karena itu konsep syura menurut Islam dan konsep demokrasi menurut Barat (Yunani) sangat jauh berbeda. Syura mendasarkan semua permasalahan harus dikembalikan kepada Alquran dan Sunnah, sedangkan demokrasi semua permasalahan dikembalikan kepada rakyat.

### **Pengaruh Faham Demokrasi Terhadap Pendidikan**

Zulu (2001) dalam sebuah *Summery* dalam jurnal internasional mengemukakan hubungan demokrasi terhadap Pendidikan sangat aksiomatis, dan integratif

---

<sup>13</sup> Idris Thoha, *Demokrasi Religius; Pemikiran Politin Nurcholis Madjid dan Amien Rais* (Jakarta Selatan: Penerbit Teraju, 2005), 40-44.

<sup>14</sup> *Ibid*, 9.

interkoneksi, berbagai faktor yang memberikan preposisi atau hubungan yang dapat menentukan pola atau sistem pendidikan, konsep pendidikan. Dan pendidikan menjadi kondisi prasyarat dalam berdemokrasi. Apa sebab pendidikan menjadi instrumen atau alat dalam memperkenalkan dan mempromosikan konsep heterogenitas dan *multiculture*. Bahkan Zulu menyatakan bahwa Negara Jerman, Itali dan bagian Afrika Utara menganggap bahwa pendidikan merupakan sifat yang inheren dan menjadi ideologi yang sangat urgen. Berikut adalah simpulan dan tulisan Zulu;

*While the relationship between education and democracy is axiomatic, there are mediating factors which determine the type of education and the nature of democracy in operation. Since a specific conception of citizenship determines the form and content of education, as a facilitative process, education becomes a conditional precondition for democracy. An education mediated by different conceptions of citizenship is instrumental in promoting the hegemonic concepts and practices at a given time. This was evident in the pedagogy of the Soviet bloc and to a large extent in other forms of totalitarianism, such as in Germany and Italy and in apartheid in South Africa. However, in its "pure" form, education has inherent properties which transcend ideologies. It gives the capacity and wisdom to access and process information, to select the relevant from the general and to promote a critical understanding which is fundamental to choice. Democracy is about freedom of choice, equity and justice and no process or practice other than education has the competence to promote these fundamental values.<sup>15</sup>*

Zulu mengatakan bahwa *education has the competence to promote these fundamental values* artinya bahwa pendidikan adalah sebuah instrumen yang kompeten terhadap pembelajaran nilai-nilai sebuah demokrasi, dimana para peserta didik diajarkan nilai demokrasi seperti merdeka dalam menentukan pilihan, hak dan Keadilan, kebenaran dst.

Konsep demokrasi dalam pendidikan, Dewey memiliki pandangan yang cukup mashur tentang pengertian masyarakat demokratis, sebagaimana demokrasi sangat berhubungan dengan pendidikan. Bagaimana kemudian pendidikan memiliki fungsi sosial, bahwa sekelompok masyarakat tidak akan berkembang tanpa proses sosial. Dan pendidikan sangat bertalian dengan proses sosial tersebut. Menurut Dewey ada dua cara untuk mengukur nilai dan bentuk kehidupan sosial: 1) *the extent in which the interests of a group are shared by all its members*, and 2) *the fullness and freedom with which it interacts with other groups*. Yang pertama tingkat kenyamanan dalam masyarakat yang ada dalam masyarakat, yang kedua kebebasan berinteraksi dengan kelompok yang lain. Dua kriteria ini yang dia gunakan dalam membuat sebuah kesimpulan/contoh dalam kehidupan sosial adalah demokrasi.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Paulus Mzomuhle Zulu, *Education As A Precondition For Democracy* (Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 6, Vatican City 2001) [www.pass.va/content/dam/scienze/sociali/pdf/acta6/acta6-zulu.pdf](http://www.pass.va/content/dam/scienze/sociali/pdf/acta6/acta6-zulu.pdf)

<sup>16</sup> Barbara J. Taylor Bacon, *Education's role ...*, 147.

Pengaruh paham demokrasi terhadap pendidikan sangat kuat dan sinergis, bagaikan dua mata uang yang sama. Dalam konteks Indonesia, demokrasi dapat meningkatkan mutu pendidikan, pemikiran ini disampaikan oleh dua tokoh besar Indonesia, Nurcholis Majid dan Amien Rais yang sama-sama memasukkan masalah kesempatan, pemerataan, dan peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu kriteria atau platform politik Indonesia menuju demokrasi. Menurut Amien, Keberhasilan pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh tingkat sosial ekonominya. Karena itu kesenjangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat dapat dipastikan bias berdampak pada kesenjangan kesempatan pendidikan.<sup>17</sup>

### **Nilai-nilai demokrasi dalam Pendidikan**

Melihat pengaruh demokrasi terhadap pendidikan setidaknya demokrasi mengandung nilai-nilai berikut: 1. Nilai kesetaraan (egalitarianisme) 2. Nilai penghargaan terhadap hak-hak asasi. 3. Nilai perlindungan (*protection*) 4. Nilai keberagaman (pluralisme) 5. Nilai keadilan (*justice*) 6. Nilai toleransi 7. Nilai kemanusiaan 8. Nilai ketertiban 9. Nilai penghormatan terhadap orang lain. 10. Nilai kebebasan 11. Nilai penghargaan terhadap kepemilikan. 12. Nilai tanggung jawab 13. Nilai kebersamaan 14. Nilai kemakmuran Karena demokrasi mengandung aneka ragam nilai tersebut, maka demokrasi menempati posisi sangat strategis dalam menyeimbangkan berbagai nilai itu.<sup>18</sup>

Maka untuk mengajarkan nilai tersebut di atas maka peran Pendidikan sangatlah penting untuk dijadikan lembaga/institusi yang menyampaikan *transferring knowledge* sehingga demokrasi dapat berpenampilan sebagai "mediator" yang menjadi sarana untuk menengahi berbagai pertentangan nilai dalam kehidupan manusia.

### **Penguatan Demokrasi melalui jalur Pendidikan**

Penguatan demokrasi melalui jalur pendidikan dalam konteks Indonesia dapat dilakukan sebagai faktor krusial dan investasi modal manusia. Menurut Nurcholis Majid pendidikan memiliki dua macam dampak positif. Pertama, pendidikan berdampak pada peningkatan kemampuan kerja dengan keahlian dan profesionalisme, sehingga dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya kualitas dampak pendidikan ini merupakan batu ujian sukses-gagalnya investasi sumber daya manusia atau *human resources*. Kedua, pendidikan berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir dan bertindak rasional. Dengan peningkatan kemampuan ini, seseorang diharapkan bias menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Menyusun informasi secara sistematis dan kritis, menggunakan informasi secara efektif dan bisa mengartikulasikan informasi itu dalam bahasa yang fasih dan kuat. Dengan demikian pendidikan sebenarnya dapat membuka dan memperluas cakrawala berpikir dan memperdalam wawasan di segala

---

<sup>17</sup> Idris Thoha, *Demokrasi Religius; ...*, 279.

<sup>18</sup> Mochammad Parmudi, *Islam dan Demokrasi ...*, 16.

bidang kehidupan termasuk juga dalam bidang sosial politik. Jangkauan semua dampak pendidikan ini dapat mendorong perubahan sosial yang lebih besar di dalam masyarakat termasuk dalam peningkatan masyarakat terhadap demokrasi.<sup>19</sup>

Nurcholis dan Amien tampaknya menyadari betul terhadap pentingnya pendidikan yang dapat menjadi sumber energi masyarakat dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengenali berbagai nilai demokrasi seperti kesetaraan (egalitarianisme), nilai penghargaan terhadap hak-hak asasi, nilai perlindungan (*protection*), nilai keberagaman (pluralisme), nilai keadilan (*justice*), nilai toleransi, nilai kemanusiaan, nilai ketertiban, nilai penghormatan terhadap orang lain, nilai kebebasan, nilai penghargaan terhadap kepemilikan, nilai tanggung jawab, nilai kebersamaan, nilai kemakmuran.

Dalam realitas pendidikan di Indonesia, nilai-nilai demokrasi tersebut telah tercantum dan menjadi 18 nilai pendidikan nasional yang bersumber dari nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan Kementerian Pendidikan. Nilai-nilai tersebut bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Adapun delapan belas nilai tersebut yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.<sup>20</sup>

Meskipun telah terdapat 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya dengan cara melanjutkan nilai prakondisi yang diperkuat dengan beberapa nilai yang diprioritaskan dari 18 nilai di atas. Ke 18 nilai pendidikan karakter tersebut menurut Kemendiknas, jika diringkas diantaranya sebagai berikut:

Ke 18 nilai di atas berlandaskan dari nilai-nilai berikut ini;

1. Agama: nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan aqidah yang bersal dari agama.
2. Pancasila: Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.
3. Budaya: tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut.
4. Tujuan Pendidikan Nasional: Tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas.

---

<sup>19</sup> Idris Thoah, *Demokrasi Religius ...*, 281.

<sup>20</sup> Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas, *Pengembangan dan Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah* (Jakarta: Puskur Balitbang Kemendiknas, 2009), 9-10.

5. Undang-undang Republik Indonesia (UURI) no 17 tahun 2007 tentang RPJPN: tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong-royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

## Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini penulis ingin menghadirkan kembali pendapat Dewey tentang ada dua cara untuk mengukur nilai dan bentuk kehidupan sosial: 1) *the extent in which the interests of a group are shared by all its members*, and 2) *the fullness and freedom with which it interacts with other groups*. Yang pertama tingkat kenyamanan dalam masyarakat yang ada dalam masyarakat, yang kedua kebebasan berinteraksi dengan kelompok yang lain. Apakah kedua indikator ini sudah terwujud sebagai syarat suksesi sebuah demokrasi di Indonesia?

Yang kedua, Penulis juga ingin mengulang kembali *statement* dua tokoh besar Indonesia, demokrasi dapat meningkatkan mutu pendidikan, pemikiran ini disampaikan oleh dua tokoh besar Indonesia, Nurcholis Majid dan Amien Rais yang sama-sama memasukkan masalah kesempatan, pemerataan, dan peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu kriteria atau platform politik Indonesia menuju demokrasi. Menurut Amien, Keberhasilan pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh tingkat sosial ekonominya. Karena itu kesenjangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat dapat dipastikan bisa berdampak pada kesenjangan kesempatan pendidikan.

## Daftar Pustaka

- Abu Nashr, al-Imam Muhammad, *Islam Mengharamkan Demokrasi* (Yogyakarta: Bustan, t.t.)
- Bacon, Barbara J. Taylor, *Education's role in democracy; the power of pluralism*, Etica & Politica / Ethics & Politics, XII, 2010, 1,
- Daryanto & Suryatri Darmiatun, *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah* (Yogyakarta: Gaya Media, 2013)
- Hornby, A.S., *Oxford Advance Learner's Dictionary* (London: Oxford University Press, 2003)
- Ichsan, Muhammad, *Demokrasi dan Syura perfpektif Islam dan Barat*, Substantia, Volume 16 Nomor 1, April 2014.
- Minokal, Alina Rocka, *Analysing The Relationship Between Democracy And Development: Defining Basic Concepts And Assessing Key Linkages*, Background note (1) prepared for the Wilton Park Conference on Democracy and Development, 23-25 October 2007

---

<sup>21</sup> Daryanto & Suryatri Darmiatun, *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah* (Yogyakarta: Gaya Media, 2013), 69.

- Parmudi, Mochammad, *Islam dan Demokrasi Di Indonesia; Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam* (Laporan Hasil Penelitian individual, Dipa 2014)
- Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas, *Pengembangan dan Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah* (Jakarta: Puskur Balitbang Kemendiknas, 2009)
- Roper, Bryan S., *The History of Democracy: A Marxist Interpretation* (Pluto Press, 2012)
- Thoha, Idris, *Demokrasi Religius; Pemikiran Politin Nurcholis Madjid dan Amien Rais* (Jakarta Selatan: Penerbit Teraju, 2005)
- Zulu, Paulus Mzomuhle, *Education As A Precondition For Democracy* (Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 6, Vatican City, 2001)  
[www.pass.va/content/dam/scienze-sociali/pdf/acta6/acta6-zulu.pdf](http://www.pass.va/content/dam/scienze-sociali/pdf/acta6/acta6-zulu.pdf)